

LAYANI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Pemkot Perbarui Kerja Sama 22 OBH

YOGYA (KR) - Kerja sama antara Pemkot Yogya dengan 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah berjalan pada tahun 2022 lalu, kini diperbarui. Pembaruan kerja sama di awal tahun ini diharapkan mampu semakin memperluas layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya MM, mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi pada tahun lalu program yang digulirkan antara Pemkot Yogya dengan OBH memberikan manfaat bagi masyarakat. "Jadi perjanjian kerja sama ini merupakan yang kedua kalinya. Kami menilai ada nilai kemanfaatan bagi masyarakat sehingga perlu kami perbarui," jelasnya,

Selasa (17/1).

Sebanyak 22 OBH yang bekerja sama dengan Pemkot Yogya tersebut berada di wilayah DIY. Seluruhnya juga telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu sekaligus menjadi wujud komitmen Pemkot dalam politik anggaran untuk afirmasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Aman menjelaskan, landasan hukum untuk men-

jalankan program bantuan hukum tersebut berupa amanah Perda Kota Yogya No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Selain itu diperjelas melalui Perwal Kota Yogya No 21 Tahun 2020 terkait petunjuk pelaksanaannya. Pada tahun 2022 lalu terdapat 32 perkara baik litigasi maupun non litigasi dengan total serapan anggaran sebesar Rp 106 juta.

"Melalui program ini juga mampu mengantarkan Kota Yogya dalam memperoleh predikat kota peduli HAM dengan nilai tertinggi di DIY," jelasnya.

Kendati demikian pihaknya tetap melakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan atas berbagai masukan yang sebelumnya diterima. Sejumlah perbaikan tersebut di antaranya melakukan perjanjian kerja sama di awal tahun sehingga layanan bantuan hukum bisa dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, dibuka ruang untuk adendum kebutuhan anggaran dalam pemberian layanan bantuan

hukum yang memungkinkan OBH untuk tetap menjalankan kerja sama dengan lebih maksimal.

Setiap OBH akan mendapat anggaran untuk memberikan layanan bantuan hukum sebanyak Rp 12 juta untuk keperluan litigasi dan non litigasi.

"Adendum bisa dilakukan melalui anggaran perubahan dengan catatan alokasi anggaran di pemerintah daerah masih ada," tandasnya.

Dirinya juga meminta agar OBH memperoleh data terkait masyarakat miskin Kota Yogya. Hal ini karena layanan bantuan hukum tersebut

hanya dapat diakses secara khusus oleh masyarakat miskin. Apalagi Kota Yogya baru saja melakukan verifikasi terhadap data warga miskin pada 2022.

Sedangkan untuk mengantisipasi kondisi sosial di masyarakat yang menyulitkan kegiatan non litigasi atau sosialisasi hukum, Aman berharap OBH bisa bekerja sama dengan Kantor Kemenkumham DIY atau masuk melalui kegiatan rutin di wilayah. "Seluruh kegiatan juga bisa dipublikasikan agar masyarakat memahami bahwa ada layanan bantuan hukum yang bisa diakses," tandasnya. **(Dhi)-f**

MKJP Efektif Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berupaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran. Salah satu caranya adalah dengan mengalakkan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode KB Jangka Panjang (MKJP) yang dinilai cukup efektif.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Yogya Héristanti, mengatakan kesadaran masyarakat yang masuk dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) memang harus terus didorong agar lebih memilih MKJP dibandingkan KB tradisional atau metode jangka pendek.

"Saat sudah memiliki dua anak, sudah cukup dan mantap akan lebih baik pilih MKJP. Risiko kegagalannya rendah dibandingkan dengan metode tradisional atau jangka pendek seperti suntik dan pil KB," katanya, Selasa (17/1).

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk memang harus terus diupayakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogya mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,98 persen dari tahun sebelumnya yaitu 0,93 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya proses mobilisasi penduduk seperti kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk.

Di sisi lain tercatat dari pendataan keluarga tahun 2021, jumlah PUS mencapai 37.971 pasangan. Dari jumlah tersebut, kebutuhan KB yang belum terpenuhi sebesar 24,12 persen dan peserta KB aktif 50,4 persen.

Sejauh ini, lanjut Héristanti, sosialisasi MKJP terus dilakukan di tiap wilayah melalui kader PKK. Dengan harapan, informasi dan edukasi program KB kepada pasangan usia subur dapat meningkatkan kepesertaan pemakaian kontrasepsi modern.

"Terutama untuk penggunaan MKJP karena metode ini sangat efektif untuk mengendalikan angka kelahiran. Untuk mengakses MKJP, PUS bisa langsung datang ke puskesmas, RSUD, RS swasta, atau klinik terdekat di Kota Yogya tanpa dipungut biaya," imbuhnya.

Layanan MKJP gratis, dijelaskan Héristanti setidaknya dalam satu bulan akan diselenggarakan satu kali di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Yogya. Dalam waktu dekat layanan tersebut akan digelar di RS PKU Muhammadiyah Yogya pada 1 Februari 2023 untuk jenis IUD dan implan. Di sana juga melayani pasang baru dan bongkar pasang ganti cara. Terbuka untuk umum KTP nasional, dengan syarat merupakan pasangan usia subur maksimal usia 49 tahun, membawa KTP, dan mendaftar ke nomor 085876026665 serta isi formulir di bit.ly/KBRSPKUYK sebelum hari pelaksanaan. **(Dhi)-f**

IMM Dukong Gerakan Zero Sampah



KR-Istimewa

Sarasehan IMM Djazman Al Kindi.

YOGYA (KR) - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Djazman Al Kindi Yogyakarta mengadakan sarasehan di aula laboratorium pengkaderan IMM, Jalan Tohpati Taman Siswa, Senin (16/1) dibuka oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah H Giyok SE. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyikapi kondisi darurat sampah di Kota Yogyakarta.

Wakil Ketua Forum Kota

Hijau Yogya, H Harris Syarif Usman SH MKn memaparkan kondisi TPS Piyungan yang saat ini sudah tidak mampu lagi menampung sampah. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Yogya menargetkan zero sampah anorganik mulai 1 Januari 2023.

Muhammad Rizki SH (Ketua IMM Djazman Al Kindi) didampingi pimpinan komisariat menyerukan anggotanya untuk melaku-

kan pilah sampah dan mendukung gerakan Zero Sampah Anorganik. Dengan begitu diharapkan tidak lagi muncul fenomena darurat sampah yang selalu berulang-ulang tiap tahunnya.

"Diimbangi seluruh anggota untuk membantu kegiatan Bank Sampah dimana mereka tinggal sebagai bagian ikut peduli dan mendukung gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogya," katanya. **(Dev)-f**

507 Siswa Terima Beasiswa dari UPZ Disdikpora

YOGYA (KR) - Kesuksesan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah tapi butuh peran aktif dari semua pihak. Semua itu perlu dilakukan supaya siswa bisa mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Guna mendukung hal tersebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Disdikpora DIY menyalurkan Beasiswa Pendidikan bagi 507 siswa SD, SMP, SMA/SMK dan SLB. Para siswa yang menerima bantuan tersebut adalah putra-putri karyawan non ASN atau ASN golongan I dan 2.

"Kali ini UPZ Disdikpora menyalurkan beasiswa pendidikan bagi 507 siswa. Adapun penyaluran diperuntukkan bagi siswa SD sebanyak 149 siswa, SMP 88 siswa dan SMA sebanyak 82 siswa. Sedangkan untuk jenjang SMK jumlah siswa yang menerima beasiswa ada 86 siswa dan SLB ada 102 siswa. Jadi total beasiswa pendidikan yang diberi-

kan sebanyak Rp 608.600.000," kata Kepala Disdikpora DIY, Dr Didik Wardaya MPd di ruang kerjanya, Selasa (17/1).

Menurut Didik, penentuan siswa yang diberikan beasiswa diperoleh dari hasil rekomendasi sekolah dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Pemberian beasiswa dari dana iuran zakat yang sudah berjalan empat tahun terakhir dan terus bergulir ke depan.

Supaya keberadaan beasiswa itu bisa memberikan manfaat optimal, pihaknya meminta kepada sekolah dan orangtua untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan. Apalagi untuk siswa SMA/SMK, Disdikpora tak ingin beasiswa yang diberikan berakhir pada barang-barang tidak berfaedah bagi pendidikan.

"Saya minta beasiswa itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti buku, tas, ba-

yar les, beli pulsa paket data untuk meningkatkan belajar. Jangan sampai uang itu digunakan untuk membeli rokok atau barang yang kurang bermanfaat lainnya. Saya minta orangtua dan guru bisa membantu mereka mengelola uang yang diterima anak-anak agar digunakan untuk mempermudah akses pendidikan," ungkapnya.

Didik mengatakan, ASN di lingkup yang dipimpinya mengumpulkan dana Rp 608 juta dan disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk siswa di wilayah DIY. Dana tersebut merupakan hasil iuran sukarela ASN yang dikumpulkan tiap bulan dan diakumulasikan sekitar satu tahun. Setiap bulan ASN di lingkup Disdikpora DIY memberikan iuran sukarela dan dikumpulkan untuk membantu ini. Tapi ini tidak semua karena ada yang kami salurkan ke Baznas dan diberikan untuk Cianjur juga bencana alam lainnya. **(Ria)-f**

Nasyiatul Aisyiyah DIY Gelar FGD Pra Muswil

YOGYA (KR) - Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra Musyawarah Wilayah (Muswil) yang dilaksanakan secara daring, Minggu (15/1) diikuti oleh para Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah se DIY.

Ketua Umum PWNA DIY Nunung Damayanti SIP menegaskan pentingnya agenda FGD ini, karena selain sebagai ajang silaturahmi antar kader Nasyiah se DIY, para kader Nasyiah bisa memberikan sumbangsih pemikirannya, kemudian saling mengupgrade sebagai bentuk kepedulian Nasyiah terhadap isu perempuan dan anak.

Nunung berharap FGD ini menjadi salah satu sumber data dalam penyusunan materi musyawarah wilayah Nasyiah DIY sehingga

mampu menghasilkan program kerja yang berdampak bagi masyarakat.

Dalam agenda tersebut ketua tim materi sekaligus fasilitator FGD Syahdara Anisa Makruf SPdI MPdI menyampaikan, dalam merumuskan isu strategis Nasyiah periode 2022-2026 perlu adanya data permasalahan sosial perempuan dan anak yang terjadi di DIY.

Menurut dosen di Universitas Islam Indonesia ini, kader Nasyiah diharapkan mampu menggapai derajat Khoiru Ummah (manusia terbaik) yang mampu melakukan misi humanisasi, liberasi dan transendensi.

Dessy Pranungsari MPsi, Psikolog sebagai kader Nasyiah DIY sekaligus dosen program studi psikologi di Universitas Ahmad

Dahlan (UAD) memaparkan bahwa untuk menggapai manusia terbaik, perempuan harus memiliki kesehatan mental yang kokoh.

Sedangkan Intan Puspitasari SPsi MA, sebagai kader Nasyiah DIY juga sekaligus Dosen Program Studi Anak Usia Dini di UAD menyoroti bahwa betapa pentingnya Nasyiah bisa mengedukasi masyarakat agar mampu menghasilkan generasi yang berkualitas.

Adapun pelaksanaan Muswil Nasyiah DIY akan diselenggarakan pada 11-12 Maret 2023 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya (BBPPMPVSB), Jalan Kaligurang Km 12,5 Klidon Ngaliw Sleman mengangkat tema 'Perempuan Berdaya untuk DIY Berkeadilan'. **(Dev)-f**

DIY SEMAKIN DIMINATI WISATAWAN Turis Asing Minim, Domestik Meningkat

YOGYA (KR) - Jumlah kunjungan wisatawan di DIY dalam beberapa waktu terakhir sudah mulai normal seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Meski sampai saat ini Dinas Pariwisata (Dispar) DIY bersama Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan penghitungan terkait jumlah kunjungan wisatawan.

Dari hasil pendataan sementara yang dilakukan, jumlah wisatawan yang datang ke DIY diprediksikan ada sekitar 6,2 juta wisatawan. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan (meski tidak terlalu banyak) jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat ada 6,1 juta kunjungan wisatawan.

"Meski jumlah kunjungan wisata dapat dikategorikan normal, namun untuk kunjungan turis asing masih belum sepenuhnya pulih. Kondisi itu dipengaruhi oleh adanya kebijakan di sejumlah negara lain yang belum sepenuhnya membuka mobilitas warganya. Selain itu juga dipengaruhi minimnya penerbangan langsung atau direct flight ke DIY," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY, Singgih Raharjo di Kompleks Kepatihan, Selasa (17/1).

Singgih mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisman ke DIY. Di antaranya direct flight ke DIY sangatlah berpengaruh pada jumlah

turis asing yang datang ke Yogyakarta. Palsalnya untuk saat ini baru terdapat beberapa direct flight dari luar negeri ke DIY yakni Singapura dan Malaysia, dan sebentar lagi direncanakan Thailand.

"Sebentar lagi akan ada Smile dari Bangkok ke YIA. Mudah-mudahan dengan adanya direct flight dari luar negeri jumlah kunjungan wisatawan bisa mengalami kenaikan signifikan. Apabila hal itu bisa diwujudkan tidak hanya berdampak pada industri pariwisata, tapi juga bisa mendorong per-

tumbuhan ekonomi di DIY," ungkapnya.

Menurut Singgih berdasarkan penghitungan yang dilakukan, rata-rata pengeluaran wisatawan domestik selama berkunjung di Yogya dapat berbelanja hingga Rp 2,1 juta per kunjungan. Sementara untuk turis asing rata-rata menghabiskan 540 Dollar AS saat berwisata.

"Dari dua indikator tersebut secara tidak langsung mencerminkan bahwa DIY sangat dipercaya oleh para wisatawan untuk dikunjungi," ujarnya. **(Ria)-f**

**PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HARTA PAILIT
RISWANTO (Dalam Pailit)**

Kami Kurator RISWANTO (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Tanggal 13 Juli 2020, dalam perkara kepailitan RISWANTO (Dalam Pailit), dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan lelang Melalui Internet dengan Penawaran Tertutup (Closed Bidding) atas harta pailit dalam keadaan apa adanya (as is) berupa:

Sebidang tanah seluas 501 m² berikut bangunan permanen (Rumah) yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No. 02852, Terdaftar atas nama Riswanto, berlokasi di Jalan Salakan 2 No.275, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dijual dalam 1 (satu) paket, yang dilelangkan hak tanggungan oleh PT. BPR ADIPURA SANTOSA, Surakarta, Jawa Tengah.

Harga Limit : Rp. 2.238.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah),
Uang Jaminan : Rp. 447.600.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Waktu dan tempat pelaksanaan lelang pada:
Hari : Rabu, 1 Februari 2023
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB (Waktu Server Aplikasi Lelang Internet)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta
Penetapan Pemegang : Setelah Batas Akhir Penawaran.

Syarat-syarat Lelang:
1. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan penawaran tertutup (closed bidding) yang diayangkan pada Aplikasi Lelang Elektronik (ALE) pada domain <http://www.lelang.go.id>
2. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <http://www.lelang.go.id> dengan meremehkan dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut);
3. Peserta Lelang wajib menyerahkan uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif di terima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA), masing-masing peserta lelang;
5. Harga penawaran belum termasuk Bea Lelang dan biaya-biaya resmi lainnya;
6. Pemegang Lelang harus melunasi pokok lelang ditambah Bea Lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai Pemegang Lelang, apabila tidak ditunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendaftaran Jasa lainnya;
7. Objek lelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is), namun tidak terbatas biaya terungkap atas objek lelang, dan bukti kepemilikan hak atas tanah dikuasai oleh Kurator. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
8. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/Peserta Lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun, baik Pidana maupun Perdata kepada Kurator dan KPKNL Yogyakarta;
9. Bagi Pemegang dapat melihat langsung objek lelang pada alamat tersebut diatas, dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nomor: 0816687669 (Sdr. Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum.), atau menghubungi KPKNL Yogyakarta Telp. (0274) 523183.

Mengelang, 18 Januari 2023
Kurator Riswanto (Dalam Pailit),
Muhammad Saefudin, SH., M.Hum.